

POLICY BRIEF



MEMBERNASKAN KELEMBAGAAN BRIGADE PANGAN



Disusun Oleh:

Esty Asriyana Suryana, Agung Saras Sri Raharjo,
Amalia Ulpah, Joko Mulyono

Ditujukan Kepada:

1. BBPSDMP Kementerian Pertanian
2. Dinas Pertanian Provinsi
3. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Alternatif Solusi:

- Penguatan Kelembagaan
- Peningkatan Kapasitas SDM
- Pendampingan Berkelanjutan
- Kolaborasi Sektor Swasta

Pilihan Rekomendasi Kebijakan

Penguatan Kelembagaan. Brigade Pangan (BP) perlu bertransformasi menjadi entitas berbadan hukum seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) untuk meningkatkan akses ke permodalan, memperluas jejaring kemitraan, serta memiliki mekanisme tata kelola yang lebih profesional. Penguatan ini mencakup penyusunan aturan internal, kepengurusan yang transparan, serta strategi keberlanjutan usaha berbasis efisiensi dan inovasi pertanian.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya mencapai swasembada pangan, Pemerintah telah menginisiasi Brigade Pangan (BP) sebagai kelembagaan usaha pertanian berbasis petani milenial. BP bertujuan untuk meningkatkan produksi padi melalui penerapan teknologi modern dan manajemen usaha berbasis skala ekonomi. Namun, implementasi BP menghadapi sejumlah tantangan, seperti struktur kelembagaan yang belum mapan, rekrutmen SDM, serta skema pendampingan yang belum optimal. Diperlukan strategi penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta perbaikan regulasi agar BP dapat berperan sebagai entitas bisnis yang berkelanjutan dan tidak hanya sekadar program jangka pendek.

PENDAHULUAN

Salah satu target utama Presiden Prabowo dalam sektor pertanian nasional adalah mencapai swasembada pangan, yang ditandai dengan meningkatnya produksi beras nasional. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menginisiasi Program Optimalisasi Lahan Rawa (OPLAH) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Keberhasilan program ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola usaha pertanian.





Sebagai langkah strategis, pemerintah memperkenalkan Brigade Pangan (BP) untuk mendorong keterlibatan generasi milenial di sektor pertanian. BP merupakan kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial dan dikonsepsikan sebagai organisasi yang menjalankan pertanian modern serta berfungsi sebagai lembaga ekonomi petani.

Dalam juknis penumbuhkembangan BP, ditetapkan empat tujuan utama:

1. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam usaha pertanian, khususnya padi.
2. Membangun kelembagaan ekonomi berbasis petani milenial.
3. Mendukung percepatan pengelolaan lahan melalui bantuan sarana produksi pertanian.
4. Meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani dengan menerapkan pertanian modern.

BP memiliki orientasi ekonomi yang kuat, berbeda dari kelompok tani konvensional seperti Poktan dan Gapoktan yang lebih berfokus pada kerja sama sosial. Sebagai entitas bisnis, BP diharapkan dapat mandiri dan berkembang melalui akumulasi modal serta efisiensi pengelolaan usaha pertanian. Namun, implementasi konsep ini memunculkan berbagai tantangan, termasuk

perbedaan dengan kelembagaan petani yang sudah ada, konsekuensi dari penerapan model korporasi, serta kendala kesinambungan program dalam jangka panjang. Keberhasilan BP akan sangat bergantung pada strategi yang diterapkan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas SDM, serta membangun model bisnis yang berkelanjutan di sektor pertanian.

PERMASALAHAN

Kelembagaan BP saat ini dirasa masih belum mapan, BP hanya berstatus sebagai kelompok tani yang memiliki Surat Ketetapan (SK) tanpa badan hukum yang jelas, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Ketiadaan status hukum ini dapat membatasi akses BP terhadap sumber permodalan dan kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Di sisi lain, rekrutmen petani milenial yang menjadi sasaran utama program ini belum sepenuhnya optimal. Kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian, ditambah dengan keterbatasan keterampilan mereka dalam mengelola usaha tani modern, menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Tanpa SDM yang kompeten dan berdaya saing, sulit bagi BP untuk berkembang sebagai entitas bisnis yang mandiri.

Selain itu, sistem pendampingan bagi BP masih belum terstruktur dengan baik. Tidak adanya mekanisme pendampingan yang jelas dan berkelanjutan menyebabkan ketidakjelasan dalam peran pendamping dalam membantu BP mencapai kemandirian. Tanpa pendampingan yang efektif, BP berisiko mengalami stagnasi dalam pengelolaan usaha pertaniannya.

Lebih lanjut, BP masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan belum memiliki strategi yang jelas dalam menarik investasi swasta maupun membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan. Keterbatasan kolaborasi dengan sektor swasta ini menghambat peluang BP untuk mengembangkan skala usahanya dan meningkatkan daya saing di pasar pertanian.

ALTERNATIF SOLUSI

- Alternatif #1: Penguatan Kelembagaan. BP perlu bertransformasi menjadi entitas berbadan hukum seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) untuk meningkatkan akses ke permodalan, memperluas jejaring kemitraan, serta memiliki mekanisme tata kelola yang lebih profesional. Penguatan ini mencakup penyusunan aturan internal, kepengurusan yang transparan, serta strategi keberlanjutan usaha berbasis efisiensi dan inovasi pertanian.
- Alternatif #2: Peningkatan Kapasitas SDM. Agar BP dapat mengelola usaha tani dengan baik, anggota BP harus memiliki keterampilan agribisnis dan teknologi pertanian modern. Program pelatihan dapat mencakup manajemen usaha tani, pemanfaatan alat mesin pertanian (alsintan), teknik budidaya berbasis sains, serta pemasaran hasil panen yang lebih

efektif. Selain itu, pemberian insentif seperti bantuan modal dan akses pembiayaan dapat meningkatkan daya tarik sektor pertanian bagi generasi muda.

- Alternatif #3: Pendampingan Berkelanjutan. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pendampingan yang melibatkan penyuluh pertanian, akademisi, serta pelaku industri pertanian. Pendampingan ini mencakup konsultasi teknis, evaluasi berkala, serta akses ke sumber daya dan inovasi terbaru dalam pertanian, sehingga BP dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan tantangan di lapangan.
- Alternatif #4: Kolaborasi dengan Sektor Swasta. Untuk memastikan keberlanjutan BP, perlu dibangun kemitraan strategis dengan perusahaan agribisnis, distributor hasil pertanian, serta lembaga keuangan. Kolaborasi ini akan membuka akses BP terhadap teknologi pertanian canggih, jaringan pasar yang lebih luas, serta skema pembiayaan yang mendukung ekspansi usaha. Dengan demikian, BP dapat berkembang sebagai entitas bisnis yang mandiri dan berdaya saing tanpa terlalu bergantung pada anggaran pemerintah.

REKOMENDASI

Pilihan rekomendasi yang disarankan adalah penguatan kelembagaan BP, dimana langkah-langkah yang perlu diambil antara lain adalah:

1. Legalitas dan Kelembagaan yang Kuat. Pemerintah harus menetapkan BP sebagai lembaga resmi dengan status badan hukum yang jelas, seperti koperasi atau BUMP. Langkah ini

memastikan BP memiliki akses terhadap pembiayaan dan investasi serta dapat menjalankan kerja sama bisnis secara sah dengan berbagai pihak. Struktur organisasi BP juga perlu diperjelas dengan mekanisme kepemimpinan yang profesional dan transparan guna menjamin keberlanjutan usaha tani berbasis korporasi.

2. **Regulasi yang Mendukung.** BP perlu dimasukkan dalam kebijakan strategis nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian, BP akan memiliki alokasi anggaran yang lebih jelas serta landasan hukum yang kuat untuk implementasi di tingkat daerah. Regulasi ini juga harus mencakup kebijakan insentif bagi petani milenial serta perlindungan terhadap keberlanjutan usaha pertanian mereka.
3. **Kemitraan Strategis.** Untuk membangun ekosistem pertanian modern yang kuat, BP harus mengembangkan model kerja sama dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas petani. Bentuk kerja sama ini dapat meliputi penyediaan sarana produksi, alih teknologi, pelatihan usaha tani, serta akses pasar bagi hasil produksi BP. Kemitraan dengan sektor keuangan juga sangat penting untuk menyediakan skema pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan bagi petani anggota BP.
4. **Penguatan SDM.** Untuk mendukung daya saing BP, pemerintah perlu menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi bagi petani BP dalam penggunaan teknologi pertanian

modern, manajemen rantai pasok, dan pemasaran berbasis digital. Program ini juga harus mencakup dukungan berupa beasiswa atau bantuan pendidikan bagi generasi muda yang ingin terjun ke sektor pertanian, sehingga dapat memastikan regenerasi petani yang lebih kompeten dan berorientasi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 2023. Panduan Monitoring dan Evaluasi Brigade Pangan (Pendamping Lapangan). Jakarta. Kementan RI.
- Kementerian Pertanian RI. 2024. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 227/Kpts/RC. 010/I/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan.
- Kementerian Pertanian RI. 2024. Blueprint Kementerian Pertanian Menuju Lumbung Pangan Nasional dan Pertumbuhan PDB 6 Persen. Jakarta. Kementan RI.
- Kementerian Pertanian RI. 2024. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/Kpts/RC.010/A/10/2024
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI. 2024. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

